

Badan Kehormatan DPRD DKI Dalam Dugaan Nepotisme Perekrutan PJLP Kep Seribu

Badan Kehormatan (BK) Jakarta tengah mendalami dugaan nepotisme yang dilakukan salah satu anggota fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Muhammad Idris. Idris dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepulauan Seribu karena melakukan intervensi saat perekrutan PJLP Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) Perhubungan Kaliadem. Sedang kita dalam termasuk si pelapor (LBH), kemudian sedang kita dalam payung hukumnya sama, kata Wakil Ketua Badan Kehormatan, Oman Rahman Rakinda, usai rapat paripurna, Rabu (15/3). Oman mengaku belum memanggil Idris. Alasannya, ia mau menyelidiki laporan yang masuk terlebih dahulu. Nanti lihat keterangannya dulu, masih mengumpulkan keterangan. Sementara itu yang sudah kita lakukan, pungkasnya. Sebelumnya Idris dilaporkan Ketua Badan Pengurus LBH Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi, ke BK DPRD DKI Jakarta pada Desember 2022 lalu. Iman menyebut, Idris menitipkan 50 nama untuk diloloskan sebagai anggota PJLP. Kami mengetahui informasi ini karena saya sendiri orang Pulau (Kepulauan Seribu) kan. Jadi, banyak teman-teman yang bilang bahwa saudara ini datang ke Pelabuhan Kaliadem untuk menekan UPPD Pelabuhan guna mengakomodasi nama-nama yang dibawa untuk diluluskan," kata Iman, dikutip dari, Rabu (15/3).